



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang ada, sebagai upaya tertib pengawasan, penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana konsideran Menimbang huruf a, maka perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

8. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
9. Ketentraman dan ketertiban umum, adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menata kembali Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengendalian Operasional;
- d. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan bupati;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH****Pasal 11**

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah Jabatan Struktural eselon III.a;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

**BAB VIII
TATA KERJA****Pasal 12**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal;
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural dalam Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap pemangku jabatan struktural dalam Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB IX
KERJASAMA DAN KOORDINASI****Pasal 13**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

**BAB X
JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 43/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 101) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI JOMBANG,


SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Nopember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 082

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 12/D

D:\PERDA 2008\FINAL KELEMBAGAAN\12 th 08 Satpol.doc

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan Pembagian Urusan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan Urusan pemerintahan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya aparatur daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan azas Desentralisasi, maka dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, serta menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

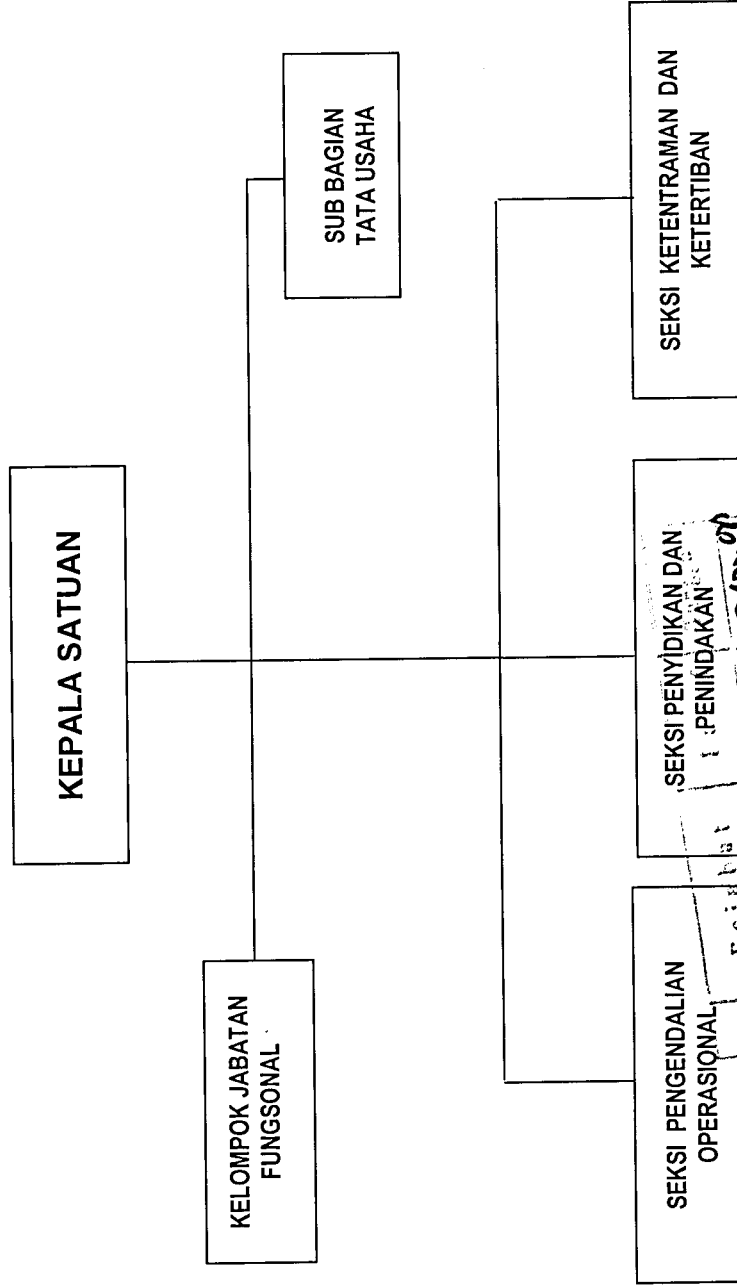
Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 12/D

SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG



BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

No.	Posisi	Penyidik	Penindakan
1.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	Ka Unit Kecil	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	Sekretaris Subbag	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**BAB X
JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 43/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 101) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Oktober 2008
BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Nopember 2008

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

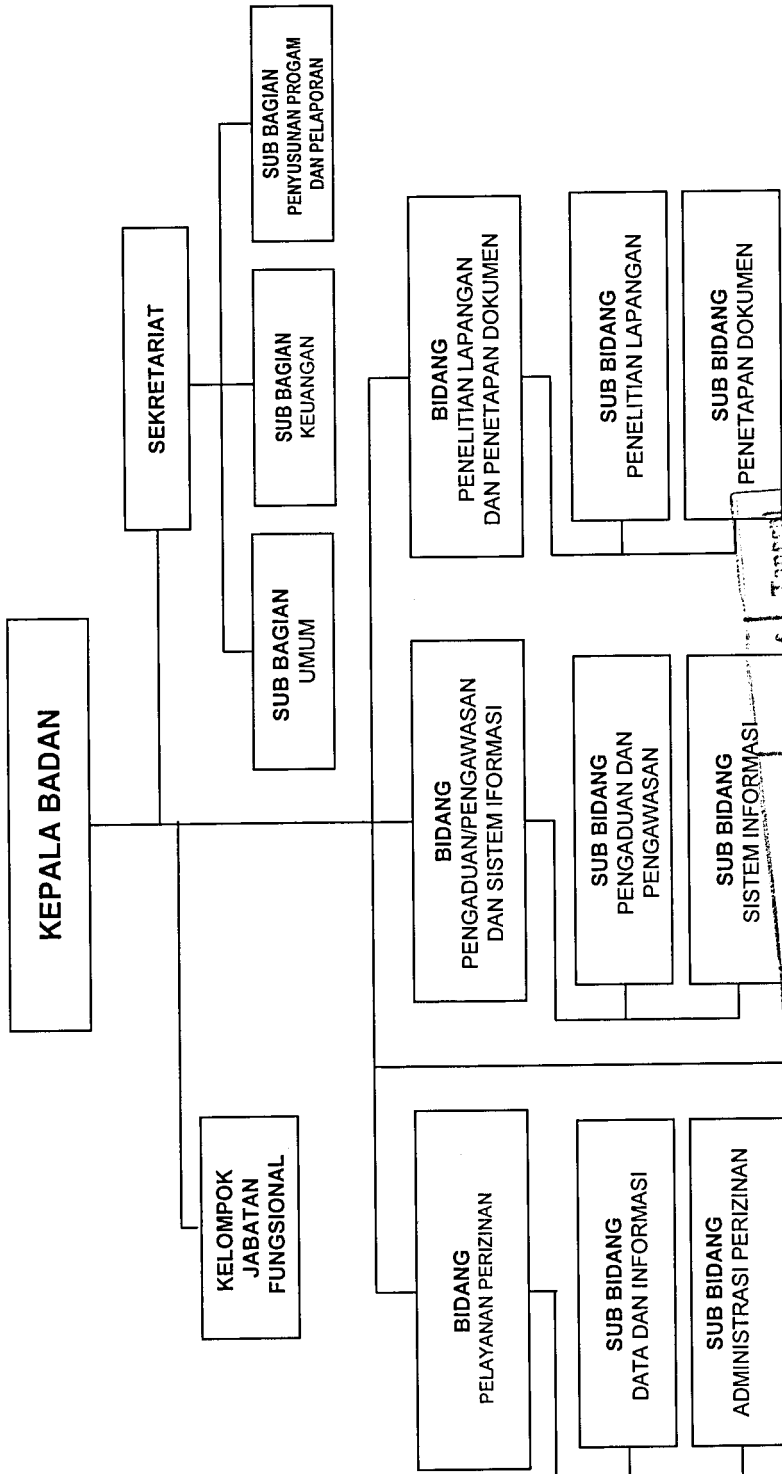
Pembina Utama Muda

NIP. 010 091 082

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 12/D
D:\PERDA 2008\FINAL KELEMBAGAAN\12 th 08 Satpol.doc

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Oktober 2008

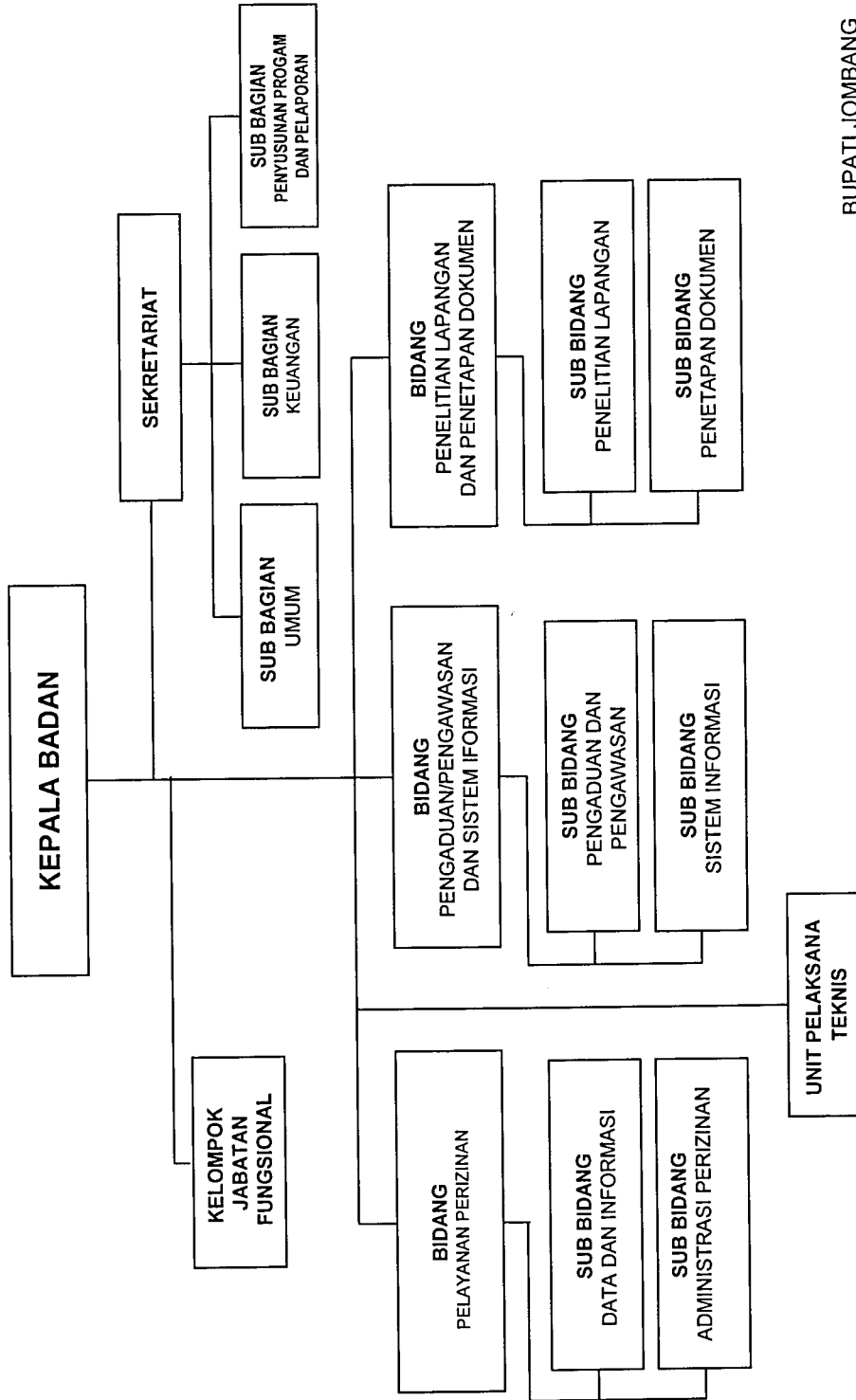


No	Pejabat	Tempat
1.	Pejabat Sekretaris Daerah	Jombang
2.	Baisten Sekda	Jombang
3.	Unit Kerja	Jombang
4.	Sekretaris abag Subbag TU.	Jombang

BUPATI JOMBANG
[Signature]
SUYANTO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Oktober 2008



BUPATI JOMBANG

SUYANTO

- (3) Bentuk dan format formulir yang dipergunakan dalam proses penyelenggaraan Perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hal lain yang berkaitan dengan kebijakan teknis operasional dan administratif Badan Pelayanan Perizinan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bab XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Unit Pelaksana Perizinan Terpadu (UPPT) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 184 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Perizinan Terpadu (UPPT), tetap melaksanakan tugas sampai Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan;
2. Tugas dan Wewenang Unit Pelaksana Perizinan Terpadu (UPPT) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun 2006 tentang Penetapan Satuan Kerja Pelayanan Perizinan Daerah, tetap dilaksanakan sampai Peraturan Daerah ini dilaksanakan;

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2009.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 15 Oktober 2008


BUPATI JOMBANG



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Nopember 2008

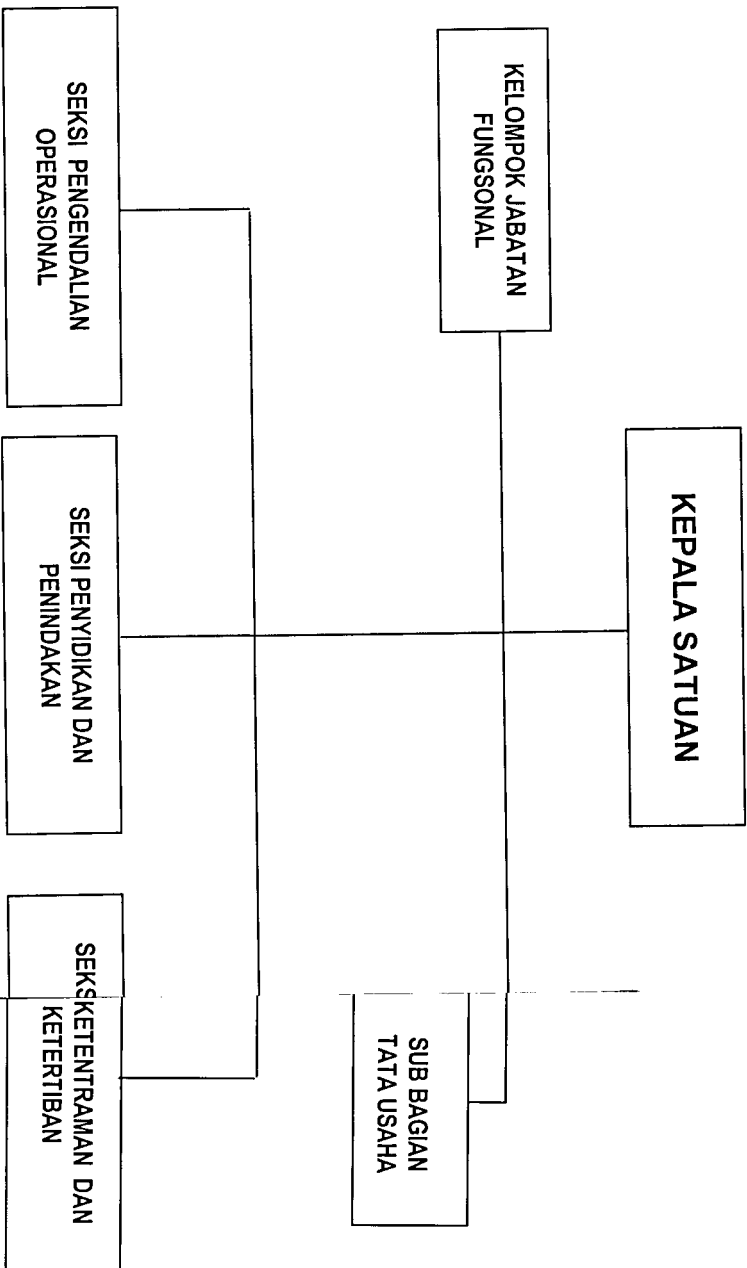
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,


M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 082

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 11/D

LAMPIRAN : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Oktober 2008

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG



BUPATI JOMBANG,

SUYANTO